

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTEKS MULTIBUDAYA

Haerun Anna

Program Studi Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia

FKIP Univ. Halu Oleo Kendari

Email: nisrinahr@yahoo.co.id

Abstrak

Krisis multidimensional menjadi tantangan berat bagi bangsa Indonesia, menyadarkan kita betapa sistem pendidikan yang kita lakukan selama ini belum mampu membentuk pribadi yang tangguh serta mengembangkan pemikiran yang kreatif untuk memecahkan berbagai persoalan. Untuk mengantisipasi era globalisasi dengan karakteristik suku dan budaya yang beragam ini diperlukan suatu arah dan kebijakan pendidikan yang membumi dan realistis yang dapat dilaksanakan di sekolah. Belum siap dan memadainya pelaksanaan sistem desentralisasi pendidikan dewasa ini disebabkan oleh kewenangan pusat dan daerah yang belum optimal, melainkan perlu penataan sistem organisasi, manajemen, sumber daya finansial, dan sebagainya. Tugas pendidikan adalah membantu masyarakat menuju perubahan masyarakat Indonesia baru yang terbuka, demokratis, dan berbudaya, meliputi (1) pendidikan kepribadian, (2) pendidikan kewarganegaraan, dan (3) pendidikan intelektual. Untuk itu, peran sekolah dalam merekonstruksi masyarakat dapat berwujud dalam berbagai tata nilai yang telah ada dalam masyarakat dengan keunggulan lokalnya dapat didekatkan dan dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah dengan strategi struktural, kultural, dan mobilitas sosial. Pentingnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia konteks multikultur berkaitan dengan (1) hakikat belajar bahasa, (2) tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, dan (3) fungsi pembelajaran bahasa Indonesia.

Kata Kunci: pendidikan; multibudaya; desentralisasi; strategi.

Abstract

The multidimensional crisis has become a serious challenge for the Indonesia. It brings us to how our education system that we have conducted during years has not been able to form strong personals and to develop creative thinking to solve various problems. To anticipate an era of globalization with various ethnic and cultural characteristics, we need some grounded and realistic direction and education policy that can be implemented in schools. The unprepared and inadequate implementation of a decentralized system of education today is caused by the central and local authorities that are not in ideal way. We need to structure organizational systems, management, financial resources, and so on. The education tasks are to help people towards Indonesian new society that come to light, democratic, and civilized. They include of (1) personal education, (2) civic education, and (3) intellectual education. Therefore, the school's role in reconstructing the society can be realized in a variety of value systems that already exist in the community with its local advantages that can be brought near and developed in learning at school with a strategy of structural, cultural, and social mobility.

Key words: *learning; multicultural; decentralization; strategy.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu aspek yang mendasar dalam usaha mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi proses dan dinamika kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pluralitas. Pendidikan merupakan suatu sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat ditandai dan diukur dari kemajuan pendidikannya. Kemajuan beberapa negara di dunia ini tidak terlepas dari kemajuan yang dimulai dan dicapai dari pendidikannya (Maksum dan Ruhendi, 2004). Untuk mengantisipasi era globalisasi dengan karakteristik suku dan budaya yang beragam ini diperlukan suatu arah dan kebijakan pendidikan yang membumi dan realistis untuk bisa dilaksanakan di sekolah. Arah dan prioritas pendidikan harus lebih diarahkan pada pemecahan masalah-masalah permanen pendidikan yang selama ini tak pernah terselesaikan.

Berbagai kasus yang terjadi di awal reformasi menunjukkan bahwa masih banyak kepingangan dalam perubahan yang terjadi. Menurut Jalal dkk. (2005) bahwa perubahan struktural belum selalu ditunjang perubahan

kultural yang sesuai. Arah perubahan struktural yang terjadi adalah ditinggalkannya model di mana negara sebagai penentu masyarakat dan pendidikan, menuju suatu sistem yang menempatkan negara dalam posisi yang berhubungan secara interaktif dengan masyarakat, industri, dan pendidikan. Sementara itu, kultur masyarakat memang tidak begitu saja dengan cepat dapat berubah menyertai perubahan struktural yang terjadi. Sebagian masyarakat mengalami kerancuan, bahkan kebingungan akan nilai-nilai dan norma.

Masalah krisis yang amat kompleks menjadi tantangan berat bagi bangsa Indonesia, menyadarkan kita betapa sistem pendidikan yang kita lakukan selama ini belum mampu membentuk pribadi yang tangguh serta mengembangkan pemikiran yang kreatif untuk memecahkan berbagai persoalan. Menurut Tilaar (2006) peralihan kehidupan bermasyarakat yang bebas, sayang sekali akhir-akhir ini berada dalam kondisi kebablasan, sehingga tidak jarang terjadi hal-hal positif yang telah tercapai sebelumnya turut menjadi korban dari keinginan untuk membebaskan diri. Dalam masa transisi sejak krisis ekonomi kemudian menjadi krisis multidimensional yang dialami oleh masyarakat Indonesia, berdampak terhadap sistem pendidikan nasional. Pendidikan dituntut dapat mempertanggungjawabkan tugas sesuai dengan misinya kepada masyarakat yang ikut memiliki dan sekaligus harus dan oleh pendidikan. Lemahnya kemampuan masyarakat dalam berbagai bidang, misalnya kekurangan dalam bidang finansial, kemampuan sosial, kultural, legal, dan kemauan politik untuk memprioritaskan pendidikan. Sebagai sistem pendidikan nasional belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Desentralisasi pendidikan sudah dilaksanakan, namun dalam hal urusan pendidikan belum mencapai tingkat kesiapan yang memadai. Masalahnya bukan hanya terletak pada kewenangan pusat dan daerah, melainkan perlunya penataan sistem organisasi, manajemen, sumber daya finansial, dan sebagainya.

Hakikat pembelajaran Bahasa Indonesia adalah proses belajar memahami dan memproduksi gagasan, perasaan, pesan, informasi, data, dan pengetahuan untuk berbagai keperluan komunikasi keilmuan, ke sastraan, dunia pekerjaan, dan komunikasi sehari-hari baik secara tertulis maupun lisan. Dalam kaitannya dengan memahami dan memproduksi gagasan, perasaan, pesan, informasi, data, dan pengetahuan untuk berbagai keperluan tersebut kegiatan berpikir mempunyai peranan sangat penting. Bahkan berpikir merupakan aktivitas sentral yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan memproduksi gagasan dan lain-lain dengan baik. Oleh karena itu, guru harus menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya proses berpikir secara optimal. Proses berpikir optimal yang

seharusnya melekat dan terus-menerus terjadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia harus disadari peserta didik dan guru dalam setiap episode pembelajaran. Ketika guru menghadirkan sebuah teks, misalnya, isi teks itu akan dipahami dengan baik bila peserta didik mampu dan mau berpikir (logis, kritis, dan kreatif). Selanjutnya, peserta didik akan dapat memproduksi gagasan dan lain-lain yang baru berdasarkan gagasan-gagasan yang ditemukan dalam teks tersebut, bila peserta didik mampu dan mau berpikir dengan baik pula. Realisasi kegiatan berpikir itu misalnya menghubungkan-gagasan, membandingkan gagasan, mempertentangkan gagasan, memilih-milah gagasan, menafsirkan data, menyimpulkan hasil analisis, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan-gagasan baru atau aspek-aspek baru yang akan dituangkan ke dalam tulisan atau paparan lisan dalam suatu peristiwa berbahasa tertentu. Dengan demikian, kegiatan berbahasa dan berpikir merupakan inti dalam pembelajaran berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran sentral untuk mempersatukan bangsa dan sarana pengembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik. Selain itu, penguasaan bahasa Indonesia oleh peserta didik juga akan menunjang keberhasilan mereka dalam mempelajari semua mata pelajaran. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia diharapkan membantu peserta didik mengembangkan potensi pikir, rasa, dan karsa untuk mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, mengemukakan gagasan dan perasaan, menemukan serta menggunakan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif yang ada dalam diri peserta didik.

B. AKUNTABILITAS PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN

Pendidikan mempunyai misi untuk menyiapkan manusia dan masyarakat demokratis, religius, memiliki kemampuan untuk memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan secara terus-menerus nilai-nilai budaya yang mengutamakan kemandirian dan keunggulan dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (Jalal, dkk., 2001). Dalam konsep masyarakat berbasis komunitas juga dikandung pengertian bahwa pendidikan harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi arah perubahan masyarakatnya, dan tugas pendidikan adalah membantu masyarakat menuju perubahan yang diinginkan. Dalam kontes ini pendidikan diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas sebagai tahap menuju masyarakat Indonesia baru yang terbuka, demokratis, dan berbudaya.

Pemerintah telah melakukan berbagai usaha dalam pencerdasan anak bangsa dengan berbagai terobosan, di antaranya mendirikan sekolah-sekolah di seluruh pelosok tanah air. Hal ini sangat menggembirakan karena diharapkan kaum terpelajar dapat ditemukan di mana-mana. Dengan banyaknya kaum terpelajar menunjukkan bahwa misi pendidikan sekolah tercapai. Seperti diketahui, misi pendidikan lembaga sekolah ada tiga, yaitu 1) pendidikan kepribadian, 2) pendidikan kewarganegaraan, dan 3) pendidikan intelektual (Uno, 2007). Dalam hal pendidikan kepribadian, sekolah membantu dan bekerja sama dengan keluarga dan lembaga agama. Dalam hal pendidikan kewarganegaraan, sekolah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat. Dalam hal pendidikan intelektual, sekolah melakukannya sendiri walaupun memperoleh bantuan dari lembaga lain, sebab misi pendidikan intelektual tersebut dilakukan secara berangka sejak taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi.

Kegiatan pendidikan di sekolah secara makro menunjukkan bahwa penciptaan program-program pendidikan memerlukan landasan berbagai cabang ilmu pengetahuan secara interdisipliner. Menurut Uno (2008) bahwa analisis keilmuan interdisipliner diperlukan, karena kegiatan pendidikan sebagai objek ilmiah merupakan: a) gejala rohani, dalam arti perkembangan rohani antara anak yang menjadi dewasa dalam konteks hubungan rohani antara anak didik dengan pendidiknya; b) peristiwa sosial, dalam arti merupakan tindakan sosialisasi dari generasi tua ke generasi muda, merupakan hubungan antarindividu, dan hubungan kelompok sosial dalam arti lokal, nasional, dan internasional; dan c) hubungan nilai norma, dalam arti kegiatan pendidikan terjadi transaksi nilai atau simbolik yang asimetris dari kelompok pendidik ke kelompok anak didik.

Pendidikan di sekolah bukanlah sekedar membuat peserta didik menjadi sopan, taat, jujur, hormat, setia, sosial, dan sebagainya. Tidak juga bermaksud hanya menjadikan mereka tahu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mampu mengembangkannya. Mendidik adalah membantu peserta didik dengan penuh kesadaran, baik dengan alat atau tidak, dalam kewajiban mereka menumbuhkembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan serta peran dirinya sebagai individu, anggota masyarakat, dan umat Tuhan. Mendidik adalah upaya menciptakan situasi yang membuat peserta didik mau dan dapat belajar atas dorongan diri sendiri untuk mengembangkan bakat, pribadi, dan potensi-potensi lainnya secara optimal ke arah yang positif. Ini menunjukkan bahwa pendidikan hanya dapat dilakukan dengan baik apabila dilakukan oleh orang-orang yang profesional yang dapat menciptakan situasi yang kondusif.

Pendidikan adalah tindakan sadar dengan cara mendidik, mengajar, dan melatih. Pada konteks yang lebih khusus, mendidik, mengajar, dan melatih dapat dilakukan secara langsung dengan tahapan tertentu dengan suatu struktur atau program tertentu yang biasa dikenal dengan pendidikan berbasis pemerintah, pendidikan formal, nonformal, yang seluruh aktivitasnya mengacu pada aturan formal, dan pendidikan berbasis masyarakat. Pada konteks yang lebih umum, tindakan sadar dalam mendidik, mengajar, dan melatih tidak terbatas hanya dilakukan secara langsung, akan tetapi tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara tidak langsung dan berjalan begitu saja tanpa ada kesengajaan, yakni anak didik berada dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dapat juga terjadi melalui contoh-contoh, himbauan-himbauan, atau keteladanan-keteladanan.

Pendidikan harus menentukan sikap yang pasti dalam pola ilmiah pokoknya. Jenis apa pun pola ilmiah pokok yang ditentukan, hendaknya berorientasi pada pengembangan potensi kreatif siswa/mahasiswa. Potensi kreatif hanya bisa ditumbuhkembangkan melalui koridor monodualistik: pencerdasan spritual dan pencerdasan moral. Sasaran pencerdasan spritual adalah membuka wawasan kehidupan sehingga bisa membentuk filsafat hidup, sedangkan sasaran pencerdasan moral adalah menumbuhkan semangat hidup, sehingga orang tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan hidup. Kedua koridor tersebut adalah jalan utama pendidikan menuju pembudayaan kehidupan manusia Indonesia mendatang. Dengan demikian, dapat dibuat suatu penilaian pendidikan sementara bahwa dunia pendidikan kita sedang mengalami krisis. Dalam arti bahwa kebijakan penyelenggaraan pendidikan tidak mampu menangkal kecerdasan global ekonomi kapitalis yang bersifat *material hedonistik*, bahkan telah tercemari olehnya. Ketidakmampuannya itu disebabkan oleh kehidupan sosial politik dan hukum yang tidak memberikan kontribusi, namun justru larut dalam *moralitas hedonisme-materialistik* tersebut. Tanpa dukungan moralitas demokrasi yang berkeadilan, tidak mungkin pendidikan mampu menjalankan visi dan misinya. Oleh sebab itu, pendidikan tidak cukup hanya dipelajari secara ilmiah teoretis dengan sasaran kecerdasan intelektual saja. Nilai-nilai hakiki pendidikan seharusnya dipelajari secara seksama dengan sasaran kecerdasan spritual, untuk kemudian dikembangkan di dalam kehidupan bermasyarakat dengan sasaran konkret berupa kecerdasan emosional.

C. SEKOLAH SEBAGAI SARANA REKONSTRUKSI MASYARAKAT

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat hanya akan berhasil apabila ada kerja sama dan dukungan yang penuh pengertian dari masyarakat dan keluarga. Sistem sekolah terwujud dengan munculnya cara interaksi sosial yang khas. Analisis perwujudan sekolah sebagai organisasi sosial dicirikan oleh: (a) memiliki suatu penghuni yang tetap, (b) memiliki struktur politik atau kebijakan umum tentang kehidupan sekolah, (c) memiliki inti jaringan sosial, (d) mengembangkan perasaan atau semangat kebersamaan sekolah, dan (e) memiliki suatu jenis kebudayaan atau subkebudayaan tersendiri (Uno, 2007). Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa sekolah memiliki peranan dalam merekonstruksi pendidikan masyarakatnya. Peran sekolah dalam merekonstruksi masyarakat dapat berwujud dalam berbagai tata nilai yang telah ada dalam masyarakat sebagai upaya mengembangkan kebudayaan. Menurut Alfian sebagaimana yang dikutip oleh Uno (2007) bahwa ada tujuh sistem nilai atau kebudayaan yang secara universal dikembangkan di sekolah, yaitu 1) bahasa, 2) sistem teknologi, 3) sistem mata pencaharian hidup dan ekonomi, 4) organisasional, 5) sistem pengetahuan, 6) religi, dan 7) kesenian.

Menurut Sihombing dan Indarjo (2003) bahwa masyarakat adalah produk lingkungan, lingkungan akan membentuk karakter masyarakatnya. Karena pendidikan ada kaitannya dengan lingkungan tersebut maka pendidikan selalu berkaitan dengan masyarakat sehingga sesungguhnya pendidikan berada di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, kebermaknaan pendidikan justru untuk masyarakat atau untuk semua. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat itu sendiri. Lembaga pendidikan ada di masyarakat hidup bersama dengan warga masyarakat. Antara masyarakat dan sekolah saling membutuhkan. Masyarakat membutuhkan agar para siswa dan remaja dibina di sekolah, sebaliknya sekolah membutuhkan agar masyarakat membantu kelancaran proses belajar di sekolah dengan memberikan berbagai macam fasilitas.

Menurut Pidarta (2007) sekolah tidak dibenarkan sebagai menara air, yaitu melebus menjadi satu dengan masyarakat tanpa memberikan identitas apa-apa. Ia juga tidak dibenarkan sebagai menara gading yang mengisolasi diri terhadap masyarakat. Lembaga pendidikan yang benar, apakah itu sekolah atau perguruan tinggi adalah ibarat menara penerang, yaitu berada di masyarakat dan sekaligus memberi penerangan kepada masyarakat setempat. Lembaga pendidikan harus tetap berakar pada masyarakat setempat, memperhatikan ide-ide masyarakat setempat, melaksanakan aspirasi mereka,

memanfaatkan fasilitas setempat untuk belajar, dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat setempat. Sementara itu, berusaha meningkatkan cara hidup dan kehidupan masyarakat dengan cara memberi penerangan, menciptakan bibit unggul, menciptakan teknologi baru, dan menciptakan suasana kondusif yang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhannya.

D. PENDIDIKAN DI SEKOLAH DENGAN SISTEM DESENTRALISASI

Desentralisasi pendidikan merupakan upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruhnya wewenang di bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit atau pejabat pusat kepada unit atau pejabat di bawahnya, atau dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, atau dari pemerintah kepada masyarakat. Salah satu wujud dari desentralisasi adalah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan. Ada tiga motif yang melatarbelakangi desentralisasi pendidikan, yaitu motif politik, motif pembiayaan (pendanaan), dan motif efisiensi. Di sini tampak bahwa motif desentralisasi pendidikan belum mengarah pada pemberdayaan sosial budaya masyarakat. Selanjutnya, dikatakan oleh Zainuddin (2008) bahwa tujuan desentralisasi pendidikan adalah (1) mengembangkan pendidikan itu sendiri secara langsung; (2) mengembangkan sistem pelaksanaan pendidikan; (3) mengubah sumber dan jumlah dana yang disediakan untuk pendidikan; (4) memberikan keuntungan pada pemerintah pusat; dan (5) memberikan keuntungan pada pemerintah daerah. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan tidaklah mudah. Banyak hal yang menjadi rintangan dalam pelaksanaannya Menurut Suryono sebagaimana yang dikutip oleh Abdurrahmansyah (2001) bahwa ada beberapa kesulitan untuk menjelaskan arah kebijakan otonomi di bidang pendidikan di Indonesia. Pertama, kesulitan yang muncul karena ada dua bingkai otonomi yang berbeda yaitu *frame* otonomi daerah dan *frame* otonomi pendidikan. Kedua, kesulitan karena masih kurang jelasnya muatan otonomi pendidikan. Ketiga, kesulitan pada usaha menangkap kebijakan itu sendiri (kebijakan siapa dan pada level mana) sehingga sulit untuk ditentukan ke mana arahnya. Ketumpangtindihan dalam menentukan kebijakan otonomi daerah dan otonomi pendidikan ini menarik untuk dicermati sebagai acuan dalam memformulasikan arah kebijakan dari masing-masing otonomi tersebut. Sebab tidak menutup kemungkinan, ketidakjelasan arah kebijakan itu justru menjadi batu sandungan bagi efektivitas penerapan otonomi pendidikan.

Dalam pelaksanaan otonomi pendidikan dihadapkan pada banyak persoalan yang ada di daerah, yaitu kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan dana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, sumber daya manusia yang belum optimal, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanjanya. Karena tidak semua daerah memiliki kekayaan alam dan sumber-sumber keuangan yang memadai maka tidak sedikit sekolah yang masih tinggi tarif pendidikannya. Jika tidak, mutu pendidikan sekolah itu kurang karena sumber keuangan yang kurang untuk membiayai kebutuhan pendidikan di sekolah itu. Menurut Parcel sebagaimana yang dikutip oleh Zainuddin (2008) ada tiga komponen yang berhubungan dengan desentralisasi pendidikan, yaitu *educational attainment*, *social condutions*, dan *occupational and income*. Jika kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan cukup besar, maka desentralisasi pendidikan layak untuk dilaksanakan, karena akan memperkuat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Namun, jika kemampuan daerah dalam pembiayaan pendidikan kurang memadai, masih diperlukan adanya intervensi dari pemerintah pusat agar pendidikan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, pada akhirnya desentralisasi pendidikan pada akhirnya tidak sepenuhnya dilaksanakan. Namun, jika daerah tidak mampu menyediakan sendiri biaya pendidikan maka pemerintah pusat harus menangani pendidikan itu agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan tidak dapat dilaksanakan.

Kewenangan di bidang pendidikan bisa dirinci mulai dari kewenangan merumuskan atau membuat kebijakan nasional di bidang pendidikan melaksanakan kebijakan nasional, dan mengevaluasi atau monitoring kebijakan nasional tersebut. Tidak semua kewenangan tersebut dapat didesentralisasikan. Kewenangan perumusan atau pembuatan kebijakan nasional mengenai pendidikan yang meliputi kurikulum, persyaratan pokok tentang jenjang pendidikan, standar kompetensi dan kompetensi dasar, persyaratan pembukaan program studi baru, persyaratan guru/pendidik di setiap jenjang pendidikan, dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang dipandang efektif dan efisien tetap menjadi kewenangan pusat dan tetap sentralisasi, sedangkan kewenangan implementasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Kebijakan yang berdimensi lokal adalah semua hal yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah. Kebijakan seperti ini biarkanlah rakyat daerah (baik melalui DPRD

maupun kelompok-kelompok kepentingan masyarakat lokal) dan pemerintah daerah yang memutuskan. Memilih kolasi dan tempat berdirinya gedung sekolah, menambah dan mengangkat guru, menentukan kurikulum lokal, dan sebagainya diberi kewenangan kepada daerah yang menentukan. Akan tetapi, pelaksanaannya tetap berlandaskan kebijakan, ketentuan, standardisasi, dan ketetapan pemerintah pusat.

E. PENGELOLAAN PENDIDIKAN DALAM PENCERDASAN BANGSA

Penyelenggaraan pendidikan nasional dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Pengaruh eksternal adalah adanya perkembangan dunia yang mengglobal yang berlaku dalam dasawarsa ini, sedangkan pengaruh internal adalah kebudayaan dan kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut akan berpengaruh pula pada pembentukan watak dan kreativitas anak bangsa. Dalam kondisi seperti ini, Ki Hajar Dewantara mengingatkan untuk menerapkan strategi *Trikon* dalam pengelolaan pendidikan. Strategi Trikon ini meliputi (1) *Konvergen*, maksudnya agar pendidikan di Indonesia dapat berkembang dengan baik, dapat setara dengan kualitas pendidikan di negara-negara maju maka sebaiknya ada adopsi nilai yang dipinjam dari kebudayaan barat, meskipun demikian perlu diadakan filter penggunaannya, (2) *Konsentris*, maksudnya bahwa untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia, haruslah bertolak dari kebudayaan yang meng-Indonesia, sehingga nilai-nilai luhur bangsa tetap tertanam dalam generasi bangsa, dan (3) *Kontinuitas*, maksudnya bahwa pendidikan di Indonesia harus dilakukan secara terus-menerus (Dimiyati, 1989).

Strategi konvergensi tersebut paling banyak dipengaruhi oleh pergolakan dunia yang apabila tidak diadaptasi dengan baik, dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan pendidikan di Indonesia. Bila kita cermati wacana sosial saat ini, tampaknya tiga bentuk masyarakat yaitu masyarakat, agraris, industri, dan informasi benar-benar menjadi kenyataan. Dengan karakteristik yang berbeda, tidak terasa model-model masyarakat itu telah membawa konsekuensi logis tertentu manakala terjadi pergeseran dari satu bentuk masyarakat ke bentuk masyarakat yang lain. Menurut Pidarta (2007) pendidikan hendaknya mendahului mengadakan perubahan sehingga menjadi contoh bagi faktor-faktor luar lainnya. Pendidikan tidak harus menyesuaikan diri dengan pengaruh luar. Jika hal ini terjadi ia akan menjadi pengikut setia tanpa inisiatif dan reaktif apa pun. Pendidikan akan selalu menjadi benda di belakang terseret oleh faktor-faktor lingkungan tadi. Sebaliknya, pendidikan

tidak selalu mendahului perkembangan yang ada, sebab kemampuan pendidikan juga terbatas. Oleh karena itu, cara yang mungkin dapat ditempuh adalah melaksanakan kedua sistem pendekatan, yaitu sistem pendekatan tertutup dan pendekatan terbuka. Di samping menyesuaikan terhadap kemauan atau tekanan faktor-faktor yang ada dalam lingkungan, pendidikan hendaknya mengadakan antisipasi terhadap arah gerak faktor-faktor luar itu. Antisipasi ini yang akan dijadikan dasar untuk mengadakan pembaharuan dalam tubuh pendidikan itu sendiri sehingga pendidikan tampak memiliki inisiatif dan kreasi yang bisa ditunjukkan kepada faktor-faktor luar dan sekaligus berfungsi sebagai mercusuar terhadap lingkungannya. Pendidikan memberi penerangan, contoh, dan teladan bagi lingkungannya.

F. PENDIDIKAN BERBASIS LINGKUNGAN

Lingkungan merupakan hal yang sangat strategis untuk didekatkan pada anak didik dalam pembelajaran. Pendidikan berbasis lingkungan difokuskan pada bagaimana konsep-konsep dasar dan permasalahan hidup dapat diadopsi oleh anak didik dalam pembelajaran.

Pendidikan berbasis lingkungan dalam implementasinya adalah bagaimana memanfaatkan keunggulan lokal sejalan dengan kebijakan nasional dan otonomi daerah yang bernuansa nasional dan global. Lebih jauh dikatakan oleh Engkoswara (2007) bahwa keunggulan lokal adalah kekayaan potensi yang dapat dikembangkan dan merupakan khasanah kehidupan yang dewasa ini masih belum diberdayakan secara optimal bahkan tidak sedikit yang ditinggalkan. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah kondisi dan kekuatan yang ada pada masing-masing daerah tertentu yang satu sama lain berbeda tetapi masih dalam keutuhan nasional dan global. Bhinneka Tunggal Ika, misalnya Jepara terkenal dengan lukisannya, Sulawesi Tenggara terkenal dengan jambu metenya, dan Makassar terkenal dengan markisanya. Potensi-potensi ini perlu terus dikembangkan dan diperkenalkan dalam dunia pembelajaran di sekolah.

Mengingat negara kita yang multibudaya, hendaknya dalam pembelajaran keunggulan-keunggulan lokal ini dapat didekatkan dan dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah. Dalam kaitan dengan pendidikan multibudaya ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu a) adanya dialog secara aktif dan partisipatoris, dan b) adanya toleransi di antara siswa maupun antara siswa dengan guru, serta antarsesama guru. Toleransi ini dimaksudkan membudayakan sikap saling menghormati, menghargai adanya perbedaan, baik perbedaan pendapat atau ideologi yang dilakukan oleh guru

maupun siswa. Melalui pembelajaran berbasis lingkungan ini diharapkan dapat terbentuk generasi yang memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga kekayaan alam yang dimiliki dapat dinikmati oleh generasi masa kini dan masa yang akan datang.

G. STRATEGI PENDIDIKAN MENGHADAPI PENGARUH GLOBALISASI

Pengaruh globalisasi tak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Globalisasi itu tampak seperti dalam bidang ekonomi, politik, kebudayaan, dan kehidupan remaja. Dalam bidang ekonomi, globalisasi ini tercermin dari adanya: (a) bantuan dana dari luar negeri, (b) penanaman modal asing di Indonesia, (c) industri, dan perdagangan bebas, dan (d) ekonomi moneter. Dalam bidang politik, globalisasi tercermin adanya tokoh-tokoh internasional yang sering mempermasalahkan HAM dan demokrasi. Bidang kebudayaan yang sudah dimasuki globalisasi, di antaranya lagu-lagu barat dan cerita-cerita barat yang masuk dalam berbagai media sehingga seolah-olah tidak menghiraukan kesenian daerah atau Indonesia, dan budaya konsumtif yang tidak puas belanja dalam negeri. Dalam kehidupan remaja yang sudah kemasukan pengaruh globalisasi di antaranya minum minuman keras, ikut-ikutan menggunakan narkoba, bermain di diskotik, melakukan tindakan kekerasan yang menyimpang dari kepribadian bangsa.

Tanggapan dan tindakan pendidikan terhadap kondisi masyarakat seperti tersebut di atas perlu dilakukan secara serius. Pertama, tanggapan terhadap kesadaran masyarakat dan remaja terhadap pendidikan. Kesadaran masyarakat dan remaja terhadap pendidikan cenderung positif dan selektif. Kesadaran seperti itu tentu sudah baik, namun ada sejumlah dari mereka yang dengan alasan tertentu bersikap positif tapi tidak selektif. Jalan yang ditempuh untuk membendung kelompok ini ada empat pilar yaitu 1) mutu sekolah dan perguruan tinggi ditingkatkan, 2) pemberian fasilitas pendidikan yang memadai, 3) adanya kemitraan pendidikan dengan dunia usaha dan masyarakat, dan 4) pengawasan mutu pendidikan dilakukan secara konsekuen. Dengan cara demikian pendidikan di sekolah tidak hanya sekedar mencari ijazah, melainkan belajar untuk menjadi pandai dan berkepribadian yang baik. Hanya mereka yang mempunyai kemampuan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Implikasi dari usaha ini adalah sekolah-sekolah kejuruan akan lebih laku dibandingkan sekarang. Kedua, mengenai tanggapan dan tindakan kita terhadap kebudayaan termasuk pendidikan yang sudah dipengaruhi oleh globalisasi, sebagian besar masyarakat menekankan pada upaya memperkuat jati diri yang bersumber pada Pancasila. Agar jati

diri kita kuat, Pancasila itu perlu lebih dioperasionalkan sehingga lebih mudah dilaksanakan. Dengan demikian, jati diri kita menjadi bertambah kokoh. Di samping itu, tindakan lain yang dapat mengurangi atau menghilangkan pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan dan kehidupan para remaja yaitu membuat pembatasan pada media masa terutama televisi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak atau remaja, dan mendukung tindakan pemerintah terhadap upaya memerangi perilaku negatif para remaja, seperti memberantas minuman keras dan narkoba, mengurangi jumlah klub malam, menangkap dan memberi hukuman terhadap yang berkelahi. Ketiga, tanggapan dan tindakan kita terhadap kondisi masyarakat termasuk pendidikan di masyarakat sebagai suatu tindakan yang selalu disadari oleh pendidik, menjadi wadah proses belajar sehingga anak dapat berkembang wajar sejak awal, membutuhkan pembenahan.

Selanjutnya, untuk membuat anak menjadi mandiri dan berkompotensi, perlu dilakukan berbagai upaya terobosan dalam kegiatan pembelajaran. Bila dalam belajar mereka sering dihadapkan pada masalah nyata terjadi di masyarakat dan diberi kesempatan untuk memecahkannya, tentu tujuan itu lama-kelamaan akan tercapai. Untuk itu, pendidikan menurut Pidarta (2007) perlu direorganisasi sebagai berikut: 1) memasukkan materi pelajaran yang diambil dari keadaan nyata di masyarakat atau keluarga, 2) metode belajar yang mengaktifkan siswa baik individual maupun kelompok, 3) beberapa kali mengadakan survai di masyarakat tentang berbagai kebudayaan, 4) ikut memecahkan masalah masyarakat dan keluarga, dan 5) memberi kesempatan berinovasi atau kreatif menciptakan sesuatu yang lebih baik tentang hidup dan kehidupan. Strategi pendidikan yang perlu dilakukan adalah strategi lingkup nasional dan strategi lingkup global. Lingkup nasional ditandai dengan dua fenomena yang substansial, yaitu a) masih berlangsungnya krisis multidimensi dan b) kuatnya tuntutan untuk dilakukannya reformasi total dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan kehidupan beragama. Konsekuensi dari pendidikan nasional adalah bahwa pendidikan dituntut untuk mampu membantu bangsa ini keluar dari krisis. Sementara itu, globalisasi semakin nyata, dan gejala ini tidak lepas dari berbagai faktor, di antaranya pesatnya perkembangan teknologi informasi, tumbuhnya berbagai masalah kependudukan dan lingkungan, keterbatasan pemerintah dalam memecahkan berbagai masalah nasional. Pesatnya perkembangan global mengharuskan pendidikan menerapkan berbagai strategi yang mendasar, misalnya: a) mutu dengan standar global supaya Indonesia bisa bersaing secara global dengan dunia luar dan b) penggunaan berbagai cara belajar dengan mendayagunakan berbagai sumber belajar.

Menurut Kuntowijoyo dalam buku Reformasi “Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah” yang dikutip oleh Jalal dkk. (2001) bahwa strategi yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi perubahan masa depan Indonesia baru ada tiga. Pertama, strategi struktural untuk mengubah keterpilahan negara dan masyarakat menuju ke suatu tahap menyatunya masyarakat dan negara. Masyarakat politik tidak dengan sendirinya menjadi satu dengan masyarakat madani, tanpa terjadinya perubahan struktural dalam bentuk, misalnya pembentukan Majelis Perwakilan yang lebih representatif, pemilahan kedudukan eksekutif dan yudikatif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kedua, strategi kultural lebih menekankan terjadinya perubahan perilaku individual dan cara berpikir. Hal ini berbeda dengan perubahan struktural yang lebih menekankan pada perubahan perilaku kolektif dan struktur politik. Ketiga, strategi mobilitas sosial bersifat lebih alami, sesuai dengan perkembangan intelektualitas dan hati nurani manusia dan masyarakatnya; dan hal ini sangat cocok untuk menciptakan masyarakat etis. Pendukung masyarakat etis adalah mereka yang sekaligus memiliki pengetahuan cukup dan iman yang mantap. Diyakini bahwa dengan pendidikan, strategi mobilitas sosial dapat menghasilkan perubahan menuju masyarakat etis secara lebih sadar dan tepat.

Dalam kehidupan masyarakat jika diperhatikan secara saksama, tampak jelas bahwa komersialisasi pendidikan berbanding lurus dengan krisis moral. Hal ini disebabkan oleh adanya pendangkalan orientasi kependidikan sebagai akibat dari sistem ekonomi pasar dunia yang material-kapitalistik. Untuk itu, perguruan tinggi perlu memikirkan strategi yang efektif dan konkret dalam mengatasi masalah itu. Dalam hal ini, menurut Suhartono (2008) paradigma pendidikan perlu direkonstruksi. Konstruksi baru pendidikan dapat dibangun berdasarkan wawasan kontekstual yang sedang berjalan dalam kehidupan masyarakat. Persoalan yang muncul adalah apakah pendidikan untuk teknologi dan industri atau teknologi dan industri untuk pendidikan. Jawabnya bukan memilih salah satu, melainkan merumuskan kedua persoalan itu ke dalam sistem simultan yang integral, dinamis, dan dialektis. Persoalan tentang pendidikan untuk teknologi dan industri adalah wajar dan tidak mengandung problema karena seluruh rangkaian kegiatan pendidikan bermuara pada terciptanya teknologi dan industri. Ketika pendidikan diselenggarakan hanya demi teknologi dan industri, berarti pendidikan cenderung menjadi marginalisasi dan pengrusakan nilai hakiki pendidikan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, ada persoalan bahwa pendidikan bisa kehilangan karakteristik spritualnya, karena secara fungsional pendidikan dinilai tidak ada relevansinya dengan pelipatgandaan produksi. Kekhawatiran tersebut dapat diatasi dengan

memutarbalikan perumusan masalah, yakni menjadi teknologi dan industri untuk pendidikan. Ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa teknologi dan industri merupakan bukti faktual adanya perkembangan kehidupan sosial yang sekaligus berfungsi dinamis dan dialektis sebagai jalan menuju masyarakat terdidik.

H. PEMBELARAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTEKS MULTIKULTURAL

Tujuan pengajaran bahasa dirumuskan dalam rangka mencapai fungsi suatu bahasa. Dengan mempertimbangkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, baik dalam kedudukan sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara (lihat UU RI Nomor 24 tahun 2009), serta sastra Indonesia sebagai hasil cipta intelektual dalam produk budaya, fungsi mata pelajaran bahasa (dan sastra Indonesia), diarahkan sebagai (1) sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, (2) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, (3) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (4) sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah, (5) sarana pengembangan penalaran, dan (6) sarana pemahaman beragam budaya Indonesia melalui khazanah kesusasatraan Indonesia (Depdikbud, 1993/1994; Depdiknas, 2003; Depdiknas, 2006; lihat pula Kemendikbud, 2013a; Kemendikbud, 2013b; Kemendikbud, 2013)

Tujuan pengajaran bahasa Indonesia (dalam beberapa sumber sering digunakan pembelajaran bahasa) dapat ditemukan dalam berbagai dokumen. Permendiknas 22 tahun 2006 tentang Standar Isi (bandingkan dengan rumusan fungsi dan tujuan dalam Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Depdiknas, 2003 dan bandingkan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam Kemendikbud, 2013a; Kemendikbud, 2013b; dan Kemendikbud, 2013c) menyatakan pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan insan Indonesia. Hal ini sejalan dengan hakikat belajar bahasa yang utama adalah belajar berkomunikasi, meski ada beberapa tujuan seseorang belajar bahasa terkait dengan fungsi pendidikan, antara lain tujuan integratif, instrumental, penalaran, dan kebudayaan. Pengajaran bahasa diarahkan pada pemberian bantuan atau peluang agar peserta didik mampu mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan

bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya.

Pentingnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia konteks multikultur berkaitan dengan (1) hakikat belajar bahasa, (2) tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, dan (3) fungsi pembelajaran bahasa Indonesia. Belajar bahasa hakikatnya adalah belajar berkomunikasi dan belajar sastra adalah belajar menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulis serta menimbulkan penghargaan terhadap hasil cipta manusia Indonesia (Depdiknas, 2004). Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan mengandung implikasi yang sangat luas. Pembelajaran bahasa Indonesia dituntut mampu menyampaikan dan menyebarkan konsep-konsep berbagai ilmu pengetahuan (bidang ilmu dasar, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan budaya /humaniora) baik untuk keperluan lembaga pendidikan formal maupun untuk keperluan yang lebih luas. Selain itu, pembelajaran bahasa Indonesia juga dituntut mampu mengembangkan konsep-konsep berbagai ilmu pengetahuan untuk mengantarkan masyarakat dan bangsa Indonesia menuju ke arah peradaban dan kehidupan modern sesuai dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir (Alwi, 2002).

I. PENUTUP

Berdasarkan kajian teori dan pembahasan tersebut di atas maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut.

1. Pendidikan multibudaya dapat dikembangkan menjadi suatu pengakuan, penghargaan, dan keadilan terhadap suatu etnik atau bangsa.
2. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam konteks multikultural di sekolah, khususnya di tingkat sekolah menengah perlu dilakukan karena para siswa hidup dalam masyarakat yang beragam. Sehubungan dengan hal itu, pembelajaran bahasa Indonesia yang bertujuan meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulis serta menimbulkan penghargaan terhadap hasil cipta manusia Indonesia, perlu mengangkat fenomena multibudaya.
3. Sekolah memiliki peranan dalam merekonstruksi pendidikan masyarakatnya. Peran sekolah dalam merekonstruksi masyarakat dapat dilihat dalam berbagai tata nilai yang telah ada dalam masyarakat sebagai upaya mengembangkan kebudayaan.

4. Penyelenggaraan pendidikan nasional dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal.
5. Desentralisasi pendidikan merupakan upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruhnya wewenang di bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit atau pejabat pusat kepada unit atau pejabat di bawahnya, atau dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, atau dari pemerintah kepada masyarakat.
6. Untuk mengantisipasi era globalisasi dengan karakteristik suku dan budaya yang beragam ini diperlukan suatu arah dan kebijakan pendidikan yang membumi dan realistik untuk bisa dilaksanakan di sekolah.
7. Strategi pendidikan yang perlu dilakukan adalah strategi lingkup nasional dan strategi lingkup global. Lingkup nasional ditandai dengan dua fenomena yang substansial: (a) masih berlangsungnya krisis multidimensi; (b) kuatnya tuntutan untuk dilakukannya reformasi total dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan kehidupan beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmansyah. (2001). *Desentralisasi: Harapan dan Tantangan bagi Dunia Pendidikan* dalam "Millah, Jurnal Studi Agama" Vol. 1 No. 1 Agustus 2001. Yogyakarta: Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
- Alwi, Hasan. (2002). *Pemberdayaan Bahasa Indonesia dalam Menghadapi Kemungkinan Timbulnya Kecemburuan Global*. Makalah disajikan dalam Seminar Internasional Prospek Pengembangan Kajian Indonesia dalam Konteks Kemajemukan Budaya, 25 Juni 2002. Semarang.
- Bakhtiar, Amsal. (2007). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2004b. *Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta: Depdiknas.
- Dimiyati, M. (1989). *Landasan Pendidikan*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Engkoswara. (2007). *Pendidikan Berbasis Unggul Lokal* dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan oleh Ali dkk. (Ed.). Bandung: Pedagogiana Press.

- Jalal, Fasli dkk. (2005). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jakarta: DepdiknAS-Bappenas Adicita Karya Nusa.
- Mohrman, Susan Albers et.al. (1994). *School-Based Management: Organizing for Hig Performance*. San Francisco: Josey Bass.
- Pidarta, Made. (2007). *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Kependidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Setiawan, Benni. (2008). *Agenda Pendidikan Nasional*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Uno, Hamzah B. (2007). *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Karsa.
- Sihombing dan Indardjo. (2003). *Pembiayaan Pendidikan*. t.t.: t.p
- Suhartono. Suparlan. (2008). *Filsafat Ilmu Pengetahuan Persoalan Eksistensi dan Hakikat Ilmu Pengetahuan*. Jogjakarta: Ar-rus Media.
- Supardan, Dadang. (2007). *Pendidikan Multibudaya dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan* oleh Ali dkk. (Ed.). Bandung: Pedagogiana Press.
- Tilaar, H.A.R. (2006). *Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zainuddin, H.M. (2008). *Reformasi Pendidikan Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.